

BAB II PERKEMBANGAN REGIONALISME ASIA TENGGARA

A. Regionalisme Asia Tenggara Menuju Integrasi Ekonomi

Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah “Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi Internasional”. Sementara itu, menurut Columbis dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul *Introductions to International Relations, Power and Justice*, terdapat empat cara atau kriteria yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisis kita. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria Geografis: mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya, seperti: Eropa dan Asia.
2. Kriteria Politik/Militer: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya Blok Sosialis, Blok Kapitalis, NATO, dan Non-Blok.
3. Kriteria Ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP dan output Industri, misalnya negara-negara Industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
4. Kriteria Transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa seperti Imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Regionalisme merupakan istilah yang menyiratkan pada sebuah kebijakan dimana aktor-aktor Negara dan non-negara bekerjasama dan mengordinasikan strategi dalam regionnya. Dengan kata lain, regionalisme ini mengacu pada kebijakan atau proyek yang dihasilkan oleh negara-negara dalam konteks regional. Tujuan dari regionalism adalah untuk meraih dan mempromosikan tujuan yang sama dalam satu atau lebih permasalahan. Pengertian ini memiliki beberapa rentang, mulai dari soft regionalism yang mengacu pada promosi rasa kebersamaan dalam kesadaran regional dan komunitas serta konsolidasi kelompok dan jaringan regional, hingga hard regionalism yang mengacu pada usaha untuk mewedahi kelompok subregional yang diformalisasikan oleh kesepakatan antar Negara dan organisasi. Adanya rentang tersebut menunjukkan bahwa dalam regionalisasi ada proses pendalaman atau deepening process dan proses perluasan atau broadening process. Regionalisme memang berdampak pada berkurangnya otoritas Negara, tetapi tidak sama sekali menghilangkan negaranya.

Regionalisme dapat mempromosikan terbentuknya komunitas dan berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, social dan keamanan. Selain itu, regionalisme juga dapat mengkonsolidasikan proses pembangunan Negara atau state building dan demokratisasi, meningkatkan transparansi, serta membuat Negara dan institusi menjadi lebih akuntabel. Oleh sebab itu, menurut Fawcett, regionalisme dapat bekerja dengan lebih baik dalam lingkungan demokratis, dimana masyarakat sipil dapat berperan lebih aktif.

Untuk pertama kalinya negara-negara Asia Tenggara mengenal organisasi regional pada saat terbentuknya SEATO (South East Asia Treaty Organization). Organisasi ini dibentuk sebagai upaya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara, terutama pengaruh dari Sovyet melalui China. Sifat pembentukannya tidak berasal dari regional

sendiri, tetapi merupakan prakarsa dari luar kawasan Asia Tenggara dan tergolong dalam kategori Aliansi.

Organisasi regional yang pertama dibentuk oleh negara-negara di kawasan ini adalah ASA (Association of Southeast Asia) pada 1961. Negara anggotanya adalah Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun organisasi ini tidak bertahan lama karena pecahnya konflik Filipina dan Malaysia atas status daerah Sabah yang diklaim sebagai wilayah Filipina. Konflik ini mendorong terbentuknya Maphilindo (Malaysia, Filipina, dan Indonesia). Tetapi Maphilindo ini bubar karena konflik Indonesia yang menentang pembentukan negara Malaysia.

Kemudian, pada 5-8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri Asia Tenggara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narcisco Ramos (Filipina) mengadakan pertemuan di Bangkok dan sepakat membentuk ASEAN (Association of South East Asian Nations) berdasarkan Deklarasi Bangkok. Baru pada 1 Januari 1984 Brunei bergabung, lalu pada tahun 1997 Vietnam, 28 Juli 1995 Laos bergabung, dan pada 23 1997 Myanmar ikut serta, dan terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Pada awalnya, ASEAN dibentuk untuk mendorong kerjasama yang lebih luas dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Deklarasi Bangkok, beberapa di antara tujuan pokok dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dan semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara; Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan negara-negara kawasan dan menghormati prinsip-prinsip piagam PBB; Ketiga,

meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi; Kelima, bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan, dan pengkajian masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup; Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan Ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri;

Berdasarkan Perjanjian Amity dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) 1976, prinsip-prinsip yang dipegang oleh negara-negara ASEAN adalah: Pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa; Kedua, setiap negara berhak untuk memimpin eksistensi nasionalnya yang bebas dari campur tangan pihak luar, subversi atau paksaan; Ketiga, tidak melakukan intervensi atau mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain; Keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai; Kelima, menolak penggunaan ancaman dan kekerasan; dan Keenam, kerjasama yang lebih efektif diantara negara-negara anggota.

Bonnie Setiawan (2013) menyimpulkan ada tiga alasan utama mengapa rantai pasokan cenderung lebih mungkin terjadi pada tingkat regional ketimbang multilateral. (Burmansyah, 2014)

1. Kebanyakan rantai pasokan adalah regional, dan bahwa dua jaminan diatas (yaitu atas bisnis di luar negeri maupun menghubungkan fasilitas-fasilitas produksi internasional) tidaklah menjadi diskriminatif, sehingga regionalism merupakan rute paling cocok.
2. Meskipun aturan-aturan multilateral yang mengatur perdagangan rantai pasokan dirasa lebih cepat, tetapi dalam hal ini WTO sudah terfokus pada isu-isu perdagangan abad ke-20 saja, disamping terbebani oleh Putaran Doha;
3. Politik offshoring kecenderungan dasarnya adalah bilateral.

FTA merupakan jalur utama dari integrasi ekonomi yang mengarah kepada regionalism. Dipilihnya rute regionalism bagi integrasi ekonomi semakin mendapat perhatian serius, setelah Negara-negara besar mendorong proyek “mega regional”, misalnya Amerika Serikat mendorong pembentukan Trans-Pasific Partnership (TPP) dan Trans-Atlantic Partnership (TAP). Di Asia terdapat rencana pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang didorong oleh China. Juga bersatunya Eropa (Uni Eropa) kemudian terbentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan hubungan regionalism-gobalisasi dimodelkan dalam bentuk regionalism terbuka, yang ditujukan untuk integrasi dengan pasar global atau sebagai proyek perlawanan terhadap kekuatan pasar global. Berbagai literature menjelaskan regionalism terbuka sebagai proyek pemerintahan merespon kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di pasar global, dan sebagai sarana untuk terlibat dengan ekonomi global. Singkatnya regionalism dimaksudkan bagi keterlibatan mendalam satu Negara ke dalam proses globalisasi. Sebagaimana globalisasi, regionalism juga menuntut adanya deregulasi domestic yang luas dan liberalisasi perdagangan, yang bertujuan untuk mengurangi peran Negara dalam kehidupan ekonomi. (Nesadurai, 2002)

Oleh karena itu, perjanjian perdagangan bebas regional memiliki kompleksitas hubungan yang bertingkat-tingkat, baik pada tingkat rezim perdagangannya (baik ditingkat tariff bea masuk, aturan-aturannya seperti pada SPS, TBT, ROO, dumping dan lainnya, implementasi, fleksibilitas dan sebagainya); isu-isu terkait perdagangan (trade related issue, seperti dalam rezim TRIPs dan TRIMs); isu-isu baru (investment, government procurement environment dan lain-lain), system ekonomi (balance of payment, subsidi, onflasi, system keuangan, kebijakan ekonomi dan lain sebagainya); maupun politik internasional (hubungan Utara-Selatan, posisi Negara-negara Least Developed Countries/ LDCs), kelompok-kelompok di perundingan WTO (seperti G-20, G-90, G-10, Cairns Group dan lain-lain); dan aspek ideologis (hegemoni, neo-liberalisme, pasar bebas, proteksionalisme dan sebagainya). (Burmansyah, 2014)

Saat ini, terdapat sekitar lebih dari 500-an FTA yang telah dinotifikasi ke WTO. Ini mencerminkan adanya dinamika baru dari integrasi ekonomi regional. Terutama yang paling menarik adalah meningkatnya FTA yang dilakukan antara Negara maju dengan Negara berkembang. Namun, kebanyakanyang diuntungkan dari perjanjian FTA ini adalah Negara-negara maju, khususnya di area-area spesifik. Bahkan seringkali di are yang sifatnya non perdagangan, terutama menyangkut isu-isu kensi seperti;

1. Perhatian atas ketahanan energy jangka panjang;
2. Desakan bagi Negara berkembang untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri gobal;
3. Mengurangi arus migrasi dari luar lewat peningkatan standar hidup kaum miskin di Negara-negara tetangga.

Selain itu FTA juga seringkali bertujuan untuk mengekspansi dan memodifikasi kembali agenda-agenda perdagangan melebihi dari yang telah disepakati WTO, misalnya melalui pemberlakuan standar lingkungan, aturan-aturan investasi serta disiplin TRIPS-plus, yang setelahnya dapat dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam perundingan WTO. Bahkan saat ini FTA menjadi lebih mengkhawatirkan karena Negara-negara maju hendak mengikat Negara-negara yang lebih lemah kepada komitmen yang dapat mengonsolidasikan posisi-posisi yang masih bertentangan atau kontroversial di dalam perundingan multilateral. Ini dinamakan sebagai “perjanjian generasi ketiga” yang memperluas isu-isu tersebut agar masuk ke dalam kebijakan domestic. Jenis FTA semacam ini telah mengubah bentuk FTA yang tadinya merupakan kerjasama tradisional berbasis preferensi unilateral atas perdagangan barang-barang ke Negara berkembang, kepada kesepakatan-kesepakatan resiprokal yang menggariskan tindakan-tindakan integrasi secara lebih dalam. Pendekatan FTA pada dasarnya bisa ditafsirkan sebagai upaya percobaan untuk menggeser proses pembuatan aturan-aturan dari tingkatan multilateral ke tingkat regional dan bilateral.

Usaha untuk mewujudkan integrasi ekonomi dimulai sejak tahun 1970an ketika ASEAN melakukan eksperimen untuk membentuk liberalisasi perdagangan lewat implementasi Preferential Trading Agreement (PTA). Usaha tersebut ternyata belum berhasil meningkatkan perdagangan intra ASEAN. PTA ini diimplementasikan pertama kali pada tahun 1970.

Pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahun 1990an, tepatnya pada tahun 1992, pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menjadi agenda serius yang dibicarakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi keempat di Bangkok. Tujuan utama dari AFTA ini adalah menghapuskan semua hambatan tariff yang masih ada dalam jangka waktu 15 tahun. AFTA

ini dimulai pada 1 Januari 1992 dengan skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Pada perkembangannya, AFTA ini kemudian di percepat realisasinya pada tahun 2001 untuk Negara anggota lama. AFTA dapat disebut sebagai batu loncatan Negara-negara ASEAN dalam menuju integrasi ekonomi melalui skema penghapusan tariff perdagangan.

Proses integrasi ekonomi tidak melulu berkaitan dengan perdagangan ataupun penurunan tariff. Isu ini kemudian menjadi perhatian khusus ASEAN adalah isu mengenai lambatnya proses integrasi yang terjadi karena perbedaan tingkat ekonomi yang begitu besar antara Negara ASEAN. Menanggapi permasalahan tersebut ASEAN kemudian mengeluarkan program Initiative for ASEAN Integration (IAI). Tujuan utama dari IAI adalah memperkecil jarak ketimpangan pembangunan dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai satu kawasan yang terintegrasi. IAI ini berusaha untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara Negara CLMV dan ASEAN. Oleh karena itu IAI ini lebih focus pada usaha untuk melakukan perbaikan di bidang pendidikan, skill development, dan penelitian tenaga kerja kepada Negara CLMV.

Pada perkembangan selanjutnya, selain perdagangan barang, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dan investasi dalam kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama dalam bidang jasa ditandatangani pada tahun 1995 dan disebut dengan ASEAN Framework on Agreement on Service (AFAS). Dalam bidang investasi, kesepakatan kerjasama yang dibentuk adalah ASEAN Investment Area (AIA) dan ditandatangani pada tahun 1998. (Indonesia K. P., Buku Menuju Asean Economic Community, 2015)

Saat ini, proses integrasi ekonomi ASEAN memasuki babak baru diawali dengan rencana pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. AEC bukanlah suatu skema integrasi yang benar-benar baru dan meninggalkan capaian agenda

integrasi sebelumnya. AEC sebenarnya merupakan perpanjangan dari agenda ASEAN sebelumnya seperti AFTA, AIA, AFAS, IAI.

Hal yang membedakan AEC dengan agenda sebelumnya adalah dibuatnya blueprint AEC sebagai pedoman dalam menjalani tahapan-tahapan dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menuju AEC 2015. Agenda-agenda sebelumnya tidak diikuti dengan penyusunan blueprint sebagai pedoman pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama regional dan pembentukan komunitas regional di ASEAN sering berakhir terbuka. Hal ini terjadi karena agenda-agenda tersebut tidak bersifat mengikat karena memang pada dasarnya ASEAN merupakan organisasi yang bersifat sukarela. ASEAN bukan komunitas supranasional, jadi perubahan yang dilakukan hanya bisa dilakukan berdasarkan aksi dari masing-masing Negara.

- **Ketimpangan Pembangunan Negara Anggota**

Salah satu tujuan pembentukan ASEAN tahun 1967 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun setelah berjalan lebih dari tiga dasawarsa, akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan. Dasar-dasar kerja sama ekonomi ASEAN terdiri dari dua unsur pokok. Di satu pihak ada anggapan yang didukung oleh bukti-bukti teoritis dan empiris bahwa kesejahteraan bangsa-bangsa dalam suatu kawasan akan lebih rendah dari yang maksimum kalau pembangunan semata-mata bertumpu pada pendekatan nasional. Setiap bangsa dan bangsa-bangsa secara keseluruhan akan memetik keuntungan kesejahteraan melalui pembagian kerja internasional. Tetapi di pihak lain, pembagian kerja atas dasar multilateralisme dihadapkan

pada berbagai hambatan. Suatu bangsa dapat mempunyai hubungan istimewa dengan bangsa lain karena kebersamaan kesejahteraan, kebersamaan kebudayaan, atau kebersamaan menghadapi musuh tertentu. Atas dasar kebersamaan-kebersamaan itu bangsa-bangsa yang demikian cenderung menjalin hubungan istimewa dalam bidang ekonomi. (Gill, 1988)

Setiap Negara mempunyai berbagai alasan untuk menghindari ketergantungan total dalam penyediaan barang dan atau jasa tertentu. Dalam sector pertanian bahan pangan pokok, misalnya, setiap bangsa berusaha mencapai tingkat swasembada tertentu walaupun bahan pangan yang bersangkutan dapat diimpor dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi dalam negeri. Dasar-dasar kerja sama ekonomi ASEAN masih tetap berlaku dan bahkan menguat dalam beberapa hal. Walaupun sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada dalam tahun 1967, pasar dalam negeri masing-masing anggota ASEAN masih tetap terbatas menurut ukuran pasar yang diperlukan oleh kegiatan tertentu untuk dapat menjadi efisien. Pasar-pasar di luar ASEAN yang diincar oleh masing-masing anggota sesuai dengan peralihan umum dari pembangunan industry atas dasar substitusi impor ke pembangunan industry atas dasar perluasan ekspor hasil-hasil olahan, cenderung lebih tertutup dan karena itu pasar ASEAN menjadi semakin penting. Begitu juga dengan pendekatan bersama dalam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi internasional. (Gill, 1988)

Dalam decade pertama, kerja sama ekonomi ASEAN masih merupakan penjajagan dan kegiatan-kegiatan lebih bersifat kegiatan diplomatic. Hal ini terutama dilakukan melalui komite-komite tetap dan komite khusus yang dibentuk sesudah Deklarasi Bangkok tahun 1967. Melalui siding komite-komite tetap dan komite khusus mulai tahun 1970, berbagai masalah ekonomi, seperti perdagangan, industry, pertanian, perkapalan, penerbangan sipil, perhubungan dan pariwisata telah dibicarakan. Karena adanya dominasi masalah politik,

ASEAN membutuhkan waktu yang panjang untuk merumuskan kerja sama ekonominya atau untuk menterjemahkan Deklarasi Bangkok 1967 ke dalam program. Kerja sama ekonomi tersebut baru mencapai bentuk formulanya pada akhir bulan Februari 1967, jadi Sembilan tahun setelah terbentuknya organisasi tersebut. (Wiharyanto, 2012)

Bangkitnya semangat untuk merealisasikan kerja sama ekonomi tersebut terdorong oleh perasaan khawatir dari dampak hubungan Amerika Serikat-RRC yang semakin erat terhadap ekonomi regional. Kekhawatiran ASEAN tersebut semakin meningkat setelah Saigon dan Phnom Penh jatuh ke tangan komunis. Dalam proses pelaksanaan kerja sama ekonomi itu, ASEAN bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama PBB dan Negara-negara Barat. Dalam proses perumusan tersebut, suatu komisi yang beranggotakan ahli-ahli dari berbagai badan PBB yang dibentuk tahun 1969 dengan restu Sidang Menlu ASEAN, memainkan peranan penting.

Pada tahun 1969, Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui dibentuknya suatu komisi yang ditugaskan melalui studi mengenai kerja sama ekonomi ASEAN. Komisi itu terdiri dari para ahli dari Negara-negara ASEAN yang punya pengalaman di berbagai organisasi ekonomi internasional, termasuk PBB. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, namun kemajuan yang diperoleh belum menggembirakan. Ternyata berbagai factor telah menghambat kerja sama tersebut, seperti perbedaan latar belakang sejarah, tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda satu sama lain, dan struktur ekonomi Negara-negara anggotanya lebih bersaing daripada saling mengisi. (Gill, 1988)

Secara normative apa yang ingin dicapai ASEAN adalah seperti yang dirumuskan dalam Deklarasi Bangkok, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social,

perkembangan kebudayaan, memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Dengan perkataan lain, ASEAN ingin mencapai kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, atau sekurang-kurangnya di antara anggotanya melalui kerja sama. Secara implisit dalam pengertian kerja sama itu terkandung adanya saling ketergantungan antar-negara dalam mencapai cita-cita tersebut. Dalam kenyataannya aspek politik dan ekonomi memang cukup dominan mewarnai kerja sama Negara-negara Asia Tenggara itu selama ini. Hal ini parallel dengan tujuan pembentukan berbagai organisasi regional, yang umumnya muncul akibat semakin besarnya tantangan politik dan ekonomi. Walaupun tujuan pokoknya adalah untuk mengatasi tantangan politik dan ekonomi, namun sebenarnya tujuan ekonomi dijadikan prioritas utama. Kerja sama dalam bidang ekonomi tidak hanya membuka jalan bagi kerja sama dalam bidang-bidang lainnya, tetapi juga merupakan prasarat untuk mencapai tujuan dalam bidang-bidang lainnya itu. Dengan demikian alasan utama penekanan kerja sama dalam bidang ekonomi adalah bahwa kerja sama dalam bidang itu tidak kontroversial dan tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dibandingkan dengan kerja sama dalam bidang politik atau keamanan. (Gill, 1988)

Sejak Pertemuan Puncak di Bali tahun 1976, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi mulai menampakkan wujudnya yang nyata. Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang dihasilkan dalam pertemuan itu memuat pokok-pokok kerja sama ekonomi tersebut, antara lain kerja sama dibidang komoditi internasional serta masalah ekonomi dunia lainnya. Sebagai badan pelaksana pokok-pokok kerja sama ekonomi ASEAN tersebut adalah Menteri Ekonomi ASEAN. Badan tersebut merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN, mengadakan penilaian atas pelaksanaan proyek-proyek ASEAN yang mendapatkan

persetujuan dan mengadakan tukar pikiran serta konsultasi mengenai kebijaksanaan pembangunan nasional sebagai langkah kearah mengharmonisasikan pembangunan regional.

ASEAN yang dikonsepsikan sebagai wahana untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan kebudayaan, selama ini banyak mendapat pengakuan dunia internasional karena efektivitasnya untuk menstimulir stabilitas dinamis kawasan. Selain tentu saja organisasi regional itu memang pernah memperlihatkan kinerja ekonomi yang mengesankan. Hal ini tentu saja tidak menutup kenyataan, bahwa selama eksistensinya, ASEAN juga tidak bebas dari berbagai ganjalan kerja sama, terutama ganjalan kerja sama ekonomi dan politik. Beberapa kali ketika berupaya menyelesaikan konflik Indocina menyusul penyerbuan Vietnam ke Kamboja tahun 1978, ASEAN dihadapkan pada perbedaan persepsi. Ada yang menganggap china sebagai kawan dan Vietnam sebagai musuh (pengancam). Di lain pihak, wajar saja perbedaan itu muncul, karena bagaimanapun juga latar belakang sejarah dan pandangan strategi masing-masing anggota tidaklah sama. Ada yang merdeka melalui proses perjuangan bersenjata melawan kekuatan colonial, ada yang tidak melalui proses seperti itu. Ada yang kemudian mengembangkan system politik multipartai demokratis, ada yang pemerintahan otoritarian. Ada yang menjalin kerja sama dan memelihara hubungan dekat dengan kekuatan ekstra-regional, ada yang selalu mengedepankan semangat Nonblok dan mandiri.

Namun, di atas semua perbedaan tersebut dan terlepas dari ada-tidaknya kerja sama dalam ASEAN, perekonomian Negara-negara anggotanya secara umum memang meningkat, tetapi ada yang cepat dan lambat sesuai dengan struktur ekonominya. Negara yang mendasarkan ekonominya pada sector industry dan perdagangan lebih mudah dikembangkan disbanding yang mendasarkan diri pada factor pertanian. Itulah sebabnya Singapura bisa

berkembang lebih cepat pertumbuhannya, disbanding Indonesia dan Filipina. Karena itu perbedaan struktur ekonomi juga menjadi ganjalan kerja sama ekonomi antar Negara. Di sisi lain, tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, tidak mudah untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang harmonis. Singapura yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, justru lebih berorientasi ke Negara-negara maju, sehingga sulit untuk saling mengisi antar-negara sekawasan yang tingkat perkembangan ekonominya lebih rendah, bahkan sangat kontras. Di samping karena perbedaan struktur (industry dan pertanian) dan tingkat perkembangan ekonomi (maju dan sedang berkembang), maka warisan sejarah juga menghambat kerja sama ekonomi. Pada umumnya Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan tanpa perjuangan berat, ekonominya lebih bisa berkembang karena tinggal melanjutkan perekonomian yang sudah dilakukan sejak masa penjajahan. Sedangkan Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dengan melalui perjuangan berat, maka pertumbuhan ekonominya lambat karena harus membongkar system ekonomi colonial untuk diganti dengan system ekonomi nasional.

Bertolak dari uraian tersebut, ganjalan kerja sama ekonomi didasari oleh latar belakang sejarah yang bisa menciptakan struktur dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Berbagai perbedaan-perbedaan tersebut membuat kerja sama ekonomi belum seperti yang diharapkan. Latar belakang sejarah Negara-negara anggota ASEAN juga menyebabkan berkembangnya pandangan strategis yang berbeda, sehingga pada gilirannya juga akan mengganjal pelaksanaan kkerja sama regional itu. Bila disbanding dengan keberhasilannya, hambatan kerja sama ekonomi ASEAN porsinya lebih kecil. Perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN sudah semakin mengglobal, lebih-lebih dengan semakin ramainya perdagangan di kawasan Pasifik. Kecenderungan perkembangan ekonomi

internasional tersebut mendorong kerja sama ekonomi ASEAN menuju ke pasar bebas ASEAN walaupun dilakukan secara bertahap. Walaupun semua Negara Asia Tenggara sudah tergabung dalam ASEAN, namun karena penggabungan Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja berlangsung ketika ASEAN mulai dilanda krisis ekonomi, maka pengaruhnya bagi kerja sama politik adalah tiadanya lagi politik anti komunis di ASEAN. Namun dengan tidak adanya lagi musuh bersama ASEAN, maka menjelang berakhirnya abad ke-20 kerja sama politik ASEAN nampak menurun.

Berdasarkan uraian di atas ternyata bahwa pembentukan ASEAN dilatarbelakangi oleh fenomena [olitik internasional dan regional serta hubungan bilateral Negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan pelaksanaan kerja sama ASEAN yang mencakup seluruh Negara di kawasan Asia Tenggara itu memang sudah banyak bermanfaat bagi Asia Tenggara, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Pada dasarnya hambatan pokok adalah akibat warisan penjajah yang mewarnai system politik Negara-negara di Asia Tenggara setelah merdeka dan tidak terselesaikannya secara tuntas sisa-sisa penjajahan terutama terkait masalah perbatasan. Seperti halnya kerja sma politik, ternyata kerja sama ekonomi juga mengalami kemajuan yang mempesona, sehingga Asia Tenggara dinilai sebagai kawasan yang berkembang pesat, namun tidak berarti tanpa hambatan. Dalam kaitan dengan kerja sama ekonomi, kiranya masih diperlukan toleransi dari Negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya sudah tinggi terhadap Negara-negara yang lambat perkembangan ekonominya. Toleransi tersebut dapat diwujudkan dengan mendorong perkembangan ekonominya supaya tidak terjadi kesenjangan yang semakin dalam. Di samping itu, struktur ekonomi antar anggota ASEAN perlu dikondisikan sedemikian rupa agar bisa saling mengisi dan saling membutuhkan. Tetapi sebagaimana biasanya, perekonomian sebgaiian besar Negara berkembang, termausk

ASEAN, mempunyai kecenderungan memiliki derajat yang kecil untuk kerja sama saling melengkapi secara ekonomis dengan sesamasesamea berkembang lain. Sebagai akibat, Negara-negara tersebut pada umumnya mempunyai lebih banyak hubungan dengan Negara industry. Sedangkan kerja sama politik yang masih perlu dikembangkan adalah peningkatan kesadaran bahwa kepentingan nasional dan regional punya hubungan timbal balik yang signifikan. Dalam menghadapi masa depan yang lebih mengglobal, kiranya sudah saatnya bahwa pola kerja sama politik di arahkan ke integrasi politik. Dalam bentuk integrasi politik itu semua hambatan dapat diminimalkan. Dengan bergabungnya semua Negara komunis di Asia Tenggara, maka kerja sama ekonomi dapat mendominasi kerja sama ASEAN di masa mendatang, termasuk pembentukan komunitas ASEAN 2015.

ASEAN terkenal karena keberagamannya, baik keberagaman budaya keberagaman politik bahkan yang paling mencolok adalah keberagaman tingkat ekonominya. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kesepuluh negara dengan tingkat ekonomi yang sangat bervariasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan ekonomi yaitu sudah maju, transisi dan kurang berkembang. Singapura dan Brunai masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat ekonomi yang sudah maju. Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina masuk kedalam kategori negara dengan tingkat ekonomi yang masih dalam masa transisi. Sedangkan, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat ekonomi kurang berkembang. Secara umum negaranegara bekas jajahan di Afrika dan Asia, kecuali Singapura dan Brunai, diklasifikasikan sebagai negara *underdeveloped*, kemudian disebut sebagai *less developed* dan pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai *developing*. (D.A, 2009)

Melihat pembangunan ekonomi di ASEAN, Bank Dunia telah mengklasifikasikan negara-negara di ASEAN berdasarkan tingkat pendapatan. Bank Dunia kemudian mengklasifikasikannya menjadi empat yaitu negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, menengah tinggi, menengah rendah dan rendah. Singapura dan Brunei adalah negara terkaya di ASEAN dan dikategorikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan ekonomi tinggi. Singapura merupakan negara maju dengan diversifikasi ekonomi tinggi yang berbasis pada jasa terutama perbankan dan keuangan. Brunei perekonomiannya tidak terdiversifikasi dengan baik. Brunei tergantung pada pengolahan cadangan minyak yang besar. Malaysia adalah satu-satunya negara yang masuk kategori negara dengan pendapatan ekonomi menengah tinggi dan mempunyai rencana ambisius menjadi negara maju pada tahun 2020. Malaysia mengembangkan sektor manufaktur dan jasa dengan teknologi tinggi serta tetap mempertahankan sektor pertaniannya. Thailand, Indonesia dan Filipina masuk kedalam kategori negara dengan pendapatan ekonomi menengah rendah. Ketiga negara tersebut memiliki ciri yang hampir sama yaitu dominasi kekayaan oleh segelintir orang dan tingginya angka kemiskinan. Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos merupakan negara dengan pendapatan ekonomi rendah. Negara-negara ini masih tergantung pada sektor pertaniannya. (A, 2008)

Dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan, tidak ada acuan yang pasti karena pembangunan sendiri belum memiliki definisi tunggal. Masing-masing pihak yang berkepentingan menggunakan beberapa indikator untuk melihat ketimpangan pembangunan yang terjadi. Ada beberapa indikator yang sering digunakan misalnya saja GDP perkapita, pendapatan perkapita, pertumbuhan GDP, Human Development Index (HDI), populasi

kemiskinan, dan infrastruktur. Selanjutnya, indikator-indikator tersebut akan digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan di ASEAN.

Pada bagian selanjutnya akan disajikan data-data dari masing-masing indikator untuk kurun waktu 10 tahun dimulai dari tahun 2001 sampai 2010. Kurun waktu 10 tahun ini dapat menggambarkan capaian ASEAN dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan menuju AEC 2015. Tahun 2000 merupakan tahun dimana program Initiative for ASEAN Integration muncul, sehingga program ini dapat disebut sebagai langkah serius ASEAN untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan.

GDP Perkapita

Di antara indikator-indikator tersebut, GDP perkapita adalah indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan. Gambaran umum ketimpangan pembangunan di ASEAN dapat ditinjau dengan mengacu pada indikator GDP perkapita masing-masing negara. GDP perkapita negara-negara ASEAN sangat beragam dan

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapore	20.553	20.823	20.987	27.046	26.821	32.960	38.524	38.046	36.631	43.929
Brunai	12.121	12.070	12.971	21.863	16.882	29.922	31.486	35.623	26.486	29.195
Malaysia	3.697	3.924	4.198	4.877	5.001	5.902	6.886	7.992	6.822	8.262
Thailand	1.884	2.043	2.291	2.501	2.726	3.164	3.742	4.116	3.951	4.735
Indonesia	688	820	973	1.181	1.275	1.636	1.910	2.237	2.364	3.023
Filipina	924	959	973	1.039	1.160	1.351	1.658	1.844	1.750	2.014
Vietnam	418	439	481	555	635	725	833	1.053	1.120	1.238
Kamboja	283	296	310	392	404	516	601	756	692	731
Myanmar	162	175	179	191	106	233	333	465	420	715

Laos	326	333	362	431	418	613	703	918	911	1.045
ASEAN-6	6.644,5	6.773,2	7.065,5	9.751,2	8.977,5	12.489,2	14.034,8	14.976,3	13.000,6	15.193
CMLV	378,7	310,7	333	392,2	390,7	521,7	617,5	789	785,7	932,25

perbedaannya sangat mencolok. Berikut akan disajikan data GDP perkapita masing-masing negara dari tahun 2001 sampai pada tahun 2010.

**GDP Perkapita Negara-negara ASEAN (US\$)
Periode 2001-2010**

Sejak tahun 2001, Singapura adalah negara yang GDP perkapitanya terbesar sedangkan Myanmar sejak tahun 2001 GDP perkapitanya paling rendah di antara negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dengan membandingkan GDP perkapita kedua negara tersebut kita dapat melihat besarnya ketimpangan yang ada. Pada tahun 2001, GDP perkapita Singapura sebesar US\$ 20.553 dan besarnya sekitar 127 kali lebih besar daripada GDP perkapita Myanmar yang hanya sebesar US\$ 162. Sepuluh tahun kemudian tidak ada perubahan yang signifikan atas perbandingan dua Negara dengan GDP perkapita terbesar dan terkecil ini. Pada tahun 2010, GDP perkapita kedua negara tersebut masih sangat besar. Singapura dengan GDP perkapita sebesar US\$ 43.929 besarnya sekitar 42 kali besar GDP perkapita Myanmar dengan besar US\$ 715. Berbicara mengenai ketimpangan, tentu saja tidak bisa luput dari perbandingan antara negara-negara ASEAN-6 dan negara-negara CLMV. GDP perkapita negara ASEAN-6 memang selalu berada jauh di atas negara-negara CLMV. Rata-rata GDP perkapita ASEAN-6 selalu jauh diatas CLMV dan selalu begitu dalam kurun waktu 10 tahun. Pada tahun 2001, rata-rata GDP ASEAN-6 sebesar US\$ 6.644,5 sedangkan rata-rata GDP perkapita CLMV hanya sebesar US\$ 378,75. Pada tahun 2010, setelah 10 tahun pembangunan, tidak ada perubahan yang signifikan dari kondisi

yang timpang ini. Rata-rata GDP perkapita ASEAN-6 mencapai US\$ 15.193 sebaliknya rata-rata GDP perkapita CLMV hanya naik sedikit ke angka US\$ 932,25. Kondisi ini menyebabkan terbaginya ASEAN menjadi dua kelompok yaitu ASEAN-6 yaitu 5 negara pendiri ASEAN ditambah dengan Brunai dan CLMV yaitu Negara anggota baru ASEAN. (ASEAN, n.d.)

- **AEC Blueprint**

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu focus dari penelitian ini, lebih dalam akan dibahas di bab selanjutnya. Namun sebagai pengenalan awal, secara singkat dapat dijelaskan bahwa AEC ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia Tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa, investasi dan lalulintas modal serta tenaga kerja terampil.

AEC dibangun dalam empat pilar utama yaitu; (Indonesia D. P., 2014)

1. Single Market and Production Base

Dengan terbukanya komunitas ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai satu entitas pasar. Setiap Negara menjadi pemain yang dapat menawarkan berbagai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat ASEAN. Selain itu, setiap Negara harus memiliki basis produksi yang kuat dan berkualitas. Single market and production base memiliki 5 elemen utama yaitu bebas barang, jasa, investasi, aliran modal yang bebas dan tenaga yang terdidik.

2. High Competitiveness

AEC memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing setiap Negara yang terlibat sekaligus kawasan. Tidak diragukan bahwa kerjasama dan kolaborasi kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak competitive advantage dan menjadi magnet bagi dunia global.

3. Equitable Growth

Meski dalam berbisnis selalu ada persaingan, AEC adalah upaya bersama untuk menyejahterahkan semua anggotanya.

4. Economic Integration to The Global Economy

Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukanlah upaya untuk mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, komunitas ekonomi ASEAN ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan value yang lebih tinggi.

Sejarah dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar dimaksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga di desain sebagai kerjasama antarnegara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, Negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah Negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.

Sejumlah kerjasama bidang ekonomi yang dilaksanakan ASEAN, diantaranya ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Tariff Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation Scheme (1981), ASEAN Industrial Joint Ventures Scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987).

Pasca Perang Dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) adalah kesepakatan Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA).

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Negara-negara ASEAN namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN disbanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proposinya, ekspor intra-ASEAN jauh lebih sedikit (20 persen) dibandingkan dengan ekspor ke ekstra-ASEAN yang mencapai 80 persen dari total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 8 persen dengan pangsa mencapai 80 persen dari total impor ASEAN. Keadaan ini menunjukkan bahwa meski tariff telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal (Anabarja, 2010). Karena itu, para pemimpin Negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA sudah tidak mencukupi lagi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini ditegaskan lima

tahun kemudian (1997) ASEAN Summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia menyetujui ASEAN Vision 2020 yang bertujuan;

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
3. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala Negara dan pemerintahan ASEAN, mengesahkan Hanoi Plan of Action/HPA, sebagai langkah awal merealisasikan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang (2011) KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei, menyetujui penyusunan Roadmap for Integration of ASEAN (RIA).

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II) yang menyetujui pembentukan ASEAN Community, yang terdiri dari ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Social-Culture Community, serta Initiative for ASEAN Integration (IAII).

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint, sebagai panduan pelaksanaannya. Melalui AEC Blueprint, pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi tahun 2015.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint merupakan masterplan bagi pembentukan AEC 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang harus memberikan perlakuan yang sama atas produk, jasa, investasi dan tenaga kerja profesional yang berasal dari Negara anggota ASEAN. Sedangkan untuk aliran modal akan dikurangi hambatannya. Meski masih terdapat pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal), dan bagi Negara anggota ASEAN yang belum siap untuk meliberalisasi sector jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sector tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua bentuk hambatan dan pengecualian perdagangan. Dengan kata lain mulai 1 Januari 2015, ASEAN akan diliberalisasi sepenuhnya.

Untuk mencapai target implementasi AEC 2015 para menteri ekonomi ASEAN dalam pertemuan di bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia mengesahkan penerapan Scorecard (kartu penilaian) sebagai mekanisme untuk mengukur kemajuan dan hambatan implementasi AEC 2015. Disamping itu Scorecard juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin pada anggota ASEAN agar secara sungguh-sungguh melaksanakan target-target yang telah ditetapkan didalam AEC Blueprint (Cetak Biru AEC).

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan wilayah khusus bagi sektor-sektor integrasi prioritas. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistic. Sektor-sektor ini merupakan yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor

ini diliberalisasi penuh, sector-sektor ini akan berintegrasikan (menyatukan, anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sector-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Tujuan utama dari Cetak Biru AEC adalah bagaimana liberalisasi yang dijalankan dengan semangat kompetisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. Dalam kaitan itu, maka AEC mengarahkan dibuatnya kebijakan bersama di antara Negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu maka ASEAN berencana mendirikan jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat); mengembangkan system Information and Communication Technologies (ICT) yang terintegrasi; membangun proyek-proyek jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi, dengan mengundang pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut melalui skema kerjasama Public-Private Partnership (PPP).

Sementara itu untuk mengatasi disparitas pembangunan di antara Negara-negara anggota ASEAN, serta antara ASEAN dengan kawasan lain, dan juga mengurangi kesenjangan antara usaha kecil dan besar, maka disusun sebuah program Initiative for ASEAN Integration (IAI). IAI adalah program pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada pelaku usaha ASEAN, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat menselaraskan diri dengan perkembangan-perkembangan baru dari kebijakan pengintegrasian ASEAN.

Cetak Biru AEC tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan sama halnya dengan percepatan liberalisasi. Aturan-aturan yang dibuat dalam AEC dibuat sedemikian rupa untuk selaras dengan aturan-aturan internasional, namun tidak membahas bagaimana

kepentingan berbagai Negara itu dikelola dan dilindungi dalam kancah aturan main internasional. Cetak biru tersebut lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Hanya sector-sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal. Namun sector-sektor integrasi prioritas yang diperkenalkan pada awal 2004 dalam VAP, sampai sekarang tidak mencapai kemajuan berarti yang dapat dilaporkan.

Jelas bahwa liberalisasi menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi ASEAN, segala bentuk perlindungan dinilai sebagai hambatan bagi kemajuan ASEAN, tanpa pernah dipelajari dengan serius bagaimana bentuk-bentuk perlindungan sesungguhnya juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan industry di satu Negara (Blueprint, 2008). Didalam AEC Blueprint hal semacam ini sama sekali tidak dibahas, jika ada pembahasan mengenai perlindungan terbatas pada bagaimana upaya untuk menghapus kebijakan dan mekanisme perlindungan di Negara-negara anggota ASEAN.

Bila pengertian mengenai komunitas mengacu pada interaksi dan kerjasama yang saling membantu diantara rakyat/pemerintah Negara-negara dalam satu kawasan, sementara gagasan pasar tunggal dan basis produksi mengandung pengertian tentang interaksi dan pertukaran diantara peserta dengan sikap saling berkompetisi. Maka seharusnya ASEAN melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat ASEAN.

Namun agaknya ASEAN punya cara pandang sendiri, jika dilihat lebih jauh kedalam, Cetak Biru AEC mengatur bahwa produk-produk kawasan termasuk yang diproduksi oleh

produsen dari Negara lain yang memiliki basis produksi di ASEAN juga dapat sebagai produksi ASEAN dan karena itu dapat dipromosikan. Aturan ini tentu tidak menguntungkan pelaku usaha dalam negeri di satu Negara.

Keterlibatan produk yang dibuat oleh produsen Negara lain yang dianggap sebagai produk ASEAN, tidak lepas dari reorganisasi fundamental dalam cara memproduksi barang dan jasa global yang belakangan dikenal dengan istilah Rantai Nilai. Reorganisasi cara produksi ini dengan sendirinya juga ikut mengubah bagaimana perdagangan barang/produk diatur melalui berbagai perjanjian, tidak kecuali dalam perjanjian AEC.

Dengan demikian maka sesungguhnya AEC 2015 mengandung kontra diksi internal. Di satu sisi AEC dalam konsepnya bermaksud memajukan produk Negara-negara anggota ASEAN, namun di sisi lain AEC mempromosikan produk-produk dari Negara lain yang bukan Negara anggota ASEAN, yang justru dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan industry dalam negeri dari Negara-negara anggotanya. Tapi agaknya bukan itu yang menjadi pertimbangan integrasi ekonomi ASEAN.

Di tengah kontradiksi yang dihadapinya, ASEAN tetap berusaha mempercepat pencapaian target-target integrasi ekonomi AEC 2015 melalui penguatan kelembagaan sesuai amanat Piagam ASEAN, yang terdiri dari ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Council, ASEAN Economic Ministers, ASEAN Free Trade Area Council, ASEAN Investment Area Council, Senior Economic Officials Meeting, dan Coordinating Committee. (Indonesia K. P., Buku Menuju Asean Economic Community, 2015)

Di samping pembentukan badan-badan tersebut, ASEAN juga menunjuk Wakil Sekretaris Jendral ASEAN bidang ASEAN Economic Cpmunity dengan tugas mengawasi

implementasi AEC Blueprint, memantau dan memfasilitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. (Indonesia K. P., Buku Menuju Asean Economic Community, 2015)

Beberapa badan penting dalam struktur AEC yaitu ASEAN Economic Community Council (AEC Council) yang merupakan Dewan yang mengoordinasikan semua Economic Sectoral Ministers seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energy, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, dan lain-lain. Setia dua kali dalam setahun dewan ini melangsungkan pertemuannya. (Indonesia K. P., Menuju ASEAN Economic Community 2015, 2013)

Selanjutnya ASEAN Economic Ministers (AEM), sebuah dewan menteri yang mengoordinasikan negosiasi dan proses implementasi integrasi masing-masing. Di bawah koordinasi AEM, terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing Dewan Menteri yang membidangi bidang barang dan investasi. Kemudian ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council) yaitu dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh menteri ekonomi masing-masing Negara anggota, bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. Dewan menteri lainnya yaitu ASEAN Investment Area Council (AIA Council) bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN